

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU EKONOMI RAKYAT BERBASIS KOPERASI INDONESIA

Nurhayati SE

Ery Wibowo

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl.Kasipah no.12 Semarang. Telp.(024) 8502720

ABSTRAK

Ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil. Koperasi secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi motor (engine) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (social welfare), sekaligus menjadi perangkat yang ampuh untuk lebih memeratakan kesejahteraan selaras dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Sebagai bentuk manifestasi ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan cermin yang tepat bagi bangsa Indonesia.

Kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi.

Kata kunci : Sumber Daya manusia, Ekonomi Kerakyatan, Koprasi Indonesia.

PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah

Negara kita adalah berdasar pada pancasila sebagaimana dengan jelas pada sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedang para pendiri negara kita dahulu berjuang melawan penjajah untuk menjadi bangsa yang merdeka ,dan berjuang untuk menjadikan bangsa yang maju,sejahtera , adil dan makmur. Dewasa ini bangsa kita adalah merupakan bangsa yang merdeka, namun kita melihat bahwa bangsa kita masih termasuk dalam kelompok bangsa-bangsa yang terbelakang, dan kemajuan yang kita capai masih lamban. Dibidang produksi pangan misalnya, negara kita masih harus banyak mengimpor berbagai komoditi, seperti gula,kedelai,buah-buahan,sayuran dan sebagainya. Padahal tanah di Indonesia sangat cocok untuk ditanami tanaman-tanaman tersebut. Sebagian besar bangsa kita adalah hidup di pedesaan,karena itu untuk meningkatkan daya saingnya , pembangunan nasional harus memprioritaskan pemberdayaan sumberdaya manusia di pedesaan. Untuk itu kopersilah yang merupakan lembaga manajemen pemberdayaan sumberdaya manusia yang tepat.

Dalam era globalisasi yang dipicu oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dibidang transportasi dan revolusi di bidang komunikasi,sehingga arus globalisasi terasa bertambah kuat,sehingga dunia terasa makin datar (Thoms Friedman,2005) . Akibat arus globalisasi maka batas antar negara menjadi kabur dan akhirnya hilang, peranan negara makin lama makin kurang semuanya itu menyebabkan persaingan antar perusahaan bertambah keras, akhirnya terjadi persaingan antar orang per orang dan terjadilah globalisasi yang menjurus pada liberalisasi. Semua arus perkembangan ini bermuara pada kapitalisme , oleh karena itu negara yang sedang membangun harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi situasi dunia global dengan mempertahankan sistim perekonomian negara masing-masing.

Pembahasan

Sesungguhnya sistem perekonomian suatu bangsa berkisar pada perbedaan antara dua pendekatan yaitu: *Pertama*, pendekatan kapitalis yang memandang modal finansial sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pendekatan manusia, yang memandang sumberdaya manusia yang menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Kedua pendekatan itu telah dilakukan. Yang pertama oleh negara-negara liberal-kapitalis di Eropa, sedangkan pendekatan kedua dilaksanakan oleh negara-negara sosialis.

Pendekatan-pendekatan tadi memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pendekatan pertama yang bertolak dari kepemilikan modal menjadikan perekonomian suatu negara bisa berkembang cepat dengan pertumbuhan yang tinggi. Sekalipun demikian, pendekatan kapitalis tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik, pertama karena terjadinya eksploitasi dan marginalisasi tenaga kerja yang menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Kedua sering menimbulkan kelebihan produksi dan jatuhnya harga barang-barang, ketiga terjadi siklus bisnis yang berulang ulang, keempat, terciptanya konsentrasi kekuatan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Kelima, terjadinya eksploitasi dan monopoli oleh yang kuat kepada yang lemah dan kerusakan lingkungan hidup serta terancamnya kelestarian sumberdaya alam. Sistem kapitalis-liberal juga menimbulkan krisis finansial global dan resesi perekonomian dunia, seperti yang akhir-akhir ini terjadi.

Sistem sosialis pada umumnya proses perkembangan ekonomi itu tidak didasarkan oleh motivasi individu maupun kelompok, melainkan dengan cara mobilisasi dari atas, sehingga timbul dua gejala, yaitu: *Pertama*, proses eksploitasi terhadap sumberdaya manusia. *Kedua*, tingkat pendapatan masyarakat rendah, daya beli rendah dan tidak terbangunnya pasar yang luas. Dengan demikian, Hukum Say yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri tidak terjadi. Selain itu, sebagai hasil eksploitasi terhadap sumberdaya manusia justru negara dan bukannya masyarakat yang bisa memperoleh penerimaan yang besar. Penerimaan negara itu kemudian menimbulkan akumulasi kapital sebagai sumber investasi negara, yang kemudian dipakai untuk membiayai pemerintahan sipil maupun militer.

Era globalisasi dengan Sistem pasar bebas menjadikan setiap roda perekonomian dikelola dengan prinsip ekonomi yang rasional dan tidak manusiawi. Dengan alasan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, pasar bebas mengabaikan pemihakan pada pelaku ekonomi lemah. Prinsip-prinsip tersebut hanya bermuara pada pengabdian kepada keuntungan belaka. Siapa yang kuat itu yang menang, menjadi slogan dari pasar bebas. Di saat itulah perdagangan bebas berhadapan dengan koperasi yang memiliki prinsip ekonomi keberpihakan.

Dalam situasi sistem perekonomian pasar bebas yang kapitalistik dan tidak manusiawi tersebut, koperasi muncul sebagai sebuah alternatif (bisa pula dikatakan sebagai: tandingan) yang paling mungkin untuk menghadapi dan menyaingi pasar bebas. Anthony Giddens dalam teori Hegemoninya menyebutkan koperasi sebagai "*The Third Way*" atau "*Jalan Tengah*" untuk melawan dan menandingi atau paling tidak sebagai penyeimbang dalam menghadapi hegemoni ekonomi kapitalistik. Dalam realitanya, koperasi sebagai sebuah alternatif yang paling mungkin dalam melawan dan menghadapi pasar bebas memiliki keterbatasan.

Dalam perbedaan tersebut kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia yang telah berhasil meletakkan sistem ekonominya sendiri. Landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Terutama pada pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Hal ini berarti pula

bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam rangka mengupayakan partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan salah satu ciri pokok sistem ekonomi nasional maka koperasi adalah lembaga usaha yang paling tepat ,khususnya untuk mawadahi masyarakat pengusaha kecil dan mikro. Oleh karena itu koperasi harus menjadi salah satu soko- guru perekonomian nasional.

Menurut teori keunggulan kompetitif , daya saing suatu bangsa ditentukan oleh sumberdaya manusia, teknologi, organisasi dan manajemen,warisan alam atau keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dari teori keunggulan kopetitif tadi diketahui bahwa sumber daya manusi adalah faktor utama yang mendasari keunggulan suatu bangsa. Dalam sistim ekonomi nasional koperasi merupakan salah satu soko-guru perekonomian nasional. Untuk mempertegas peranannya maka dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Selanjutnya dalam pasal 4 undang-undang perkoperasian dinyatakan bahwa fungsi dan peranan koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi maupun kemampuan anggota serta mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Di samping itu, koperasi juga mempunyai fungsi dan peran untuk memperkuat perekonomian rakyat, sebagai soko-guru kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dari definisi, fungsi dan peranannya,koperasi mempunyai fungsi dan peran ganda yaitu : sebagai badan usaha, pada dasarnya koperasi dibentuk untuk mewakili tindakan ekonomi bersama bagi seluruh anggota perorangan.

Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi adalah kumpulan orang yang kegiatannya diorientasikan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian ekonomi rakyat adalah unit-unit ekonomi yang diusahakan rakyat banyak. Dalam hubungan ini maka koperasi sebagai kumpulan orang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat miskin. Dengan demikian seluruh rakyat tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam koperasi, menggerakkan ekonomi rakyat untuk memperkuat sistem perekonomian nasional.

Koperasi dalam konteks demokrasi ekonomi merupakan serangkain kegiatan perekonomian yang meliputi produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat, untuk masyarakat,dan pengelolaan dan pengawasannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Dengan kata lain prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi secara nyata tercermin dalam bentuk koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

Kepentingan ekonomi rakyat, utamanya kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pegawai kecil, dsb) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingannya melalui koperasi. Inilah sebenarnya yang menjadi alasan utama pentingnya pemberdayaan koperasi, secara objektif bisa dilihat bahwa di samping ada koperasi sukses dan berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya, masih terdapat pula koperasi (bahkan mungkin secara kuantitas banyak) yang kinerjanya belum sesuai dengan harapan. Saat ini terdapat sekitar 170.411 unit koperasi (Kompas, 2010), sebuah jumlah yang besar dan potensial untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah tersebut terdapat 20-30% saja yang kualitas dan kinerjanya bagus tentu akan sangat strategis dalam perekonomian

Indonesia. Sayang sekali, hal tersebut masih belum banyak dicapai oleh perkoperasian kita. Koperasi yang berkualitas masih menjadi impian dari masyarakat karena berbagai macam faktor. Yang paling utama adalah faktor sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pengelolaan koperasi.

Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan

koperasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, dan penggerak koperasi meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan manajerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun networking, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja.

Semua kompetensi tersebut di atas apabila bisa dikembangkan secara maksimal akan menjadi kekuatan yang besar dalam membangun koperasi yang berkualitas. Ada beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tersebut.

Pertama, Peningkatan kompetensi kelembagaan. Peningkatan kompetensi kelembagaan di sini berupa penyegaran kembali, penegasan kembali, serta pemahaman kembali para seluruh penggerak koperasi baik anggota, pengurus, dan pengawas tentang jati diri koperasi (*co-operative identity*) yang meliputi pemahaman kembali akan tiga aspek koperasi yaitu pengertian koperasi (*definition of co-operative*), nilai-nilai koperasi (*values of co-operative*), dan prinsip-prinsip gerakan koperasi (*principles of co-operative*). Melalui penyegaran dan pemahaman kembali hal-hal di atas, falsafah dan prinsip-prinsip koperasi dapat dipertahankan.

Sehingga kalau suatu saat nanti koperasi tersebut bisa berkembang tetap dapat mempertahankan prinsip-prinsip etis perkoperasian Indonesia.

Kedua, Kompetensi Pengembangan Usaha dan manajerial. Setiap unsur penggerak koperasi, baik itu pengurus dan anggota harus memiliki kompetensi pengembangan usaha dan manajerial sehingga mampu mengembangkan usaha yang luwes anggota sekaligus mampu mengembangkan modal yang dipunyainya. Untuk itu para penggerak koperasi harus mampu memiliki kemampuan manajerial baik manajerial yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan organisasi maupun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Ketiga, kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan komputer dan internet menjadi syarat utama para pelaku dan pengembangan koperasi. Dengan memiliki kompetensi itu segala hal yang berkaitan dengan pemasaran, pengelolaan keuangan, mitra usaha, dan pencitraan lembaga koperasi dalam dilakukan dengan cara yang efektif dan menjangkau sasaran yang luas.

Keempat, Kompetensi membangun networks. Dalam dunia global tak hanya persaingan yang menjadi problem pelaku ekonomi, namun juga bagaimana kemampuan menjalin kerjasama dan membentuk *jejaring usaha*. Semua badan ekonomi termasuk juga koperasi harus mampu menjalin sebanyak mungkin *networks* atau jaringan kerja, harus mampu membentuk *jejaring usaha* yang seluas-luasnya sehingga dapat menciptakan pasar.

Kelima, kompetensi pengembangan program, penciptaan keunggulan persaingan usaha. Ini berkaitan dengan kemampuan usaha bagi koperasi kecil untuk dapat mengembangkan diri dengan menekankan pada sebuah produk atau layanan unggulan sekaligus membangun pasar bagi produk atau layanan jasa yang

dilakukan. Kompetensi ini dapat diraih dengan menekankan pada bentuk pendidikan dan latihan kewirausahaan, pendampingan usaha dan permodalan.

Keenam, adalah kompetensi optimalisasi pelayanan. Ini berarti setiap pengurus maupun anggota koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya sekaligus mampu memenuhi kebutuhan kolektif tersebut. Setelah identifikasi akan dapat ditentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan pelbagai aspirasi. Dengan pemberdayaan yang berkesinambungan koperasi diharapkan tumbuh berkembang dan berkualitas sehingga memiliki daya tawar yang setara dengan pelaku ekonomi lain. Untuk itu perlu adanya upaya yang serius untuk meningkatkan dan memberdayakan kompetensi sumber daya manusia perkoperasian yang dilakukan secara kontinuitas baik melalui media pendidikan, media massa maupun media yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Menciptakan sistem dan lembaga jaringan usaha koperasi disektor usaha ekonomi rakyat. Dengan terbentuknya jaringan usaha ini maka pasar koperasi akan lebih terintegrasi dan menyebabkan skala ekonomi koperasi menjadi lebih besar. Skala ekonomi koperasi bertambah besar akan dapat meningkatkan daya saingnya tersebut koperasi akan dapat lebih memperluas lagi jaringan usahannya. Dan mencegah persaingan antar koperasi yang dapat menimbulkan ketidak pastian usaha dan mengarahkan menjadi kerjasam yang lebih produktif. Disamping itu sistem tersebut akan menciptakan gagasan-gagasan inovatif,yang akan lebih meningkatkan keunggulan daya saing koperasi.
- b. Menciptakan sistem dan struktur kelembagaan koperasi yang efisien, baik kedalam maupun keluar, kedalam koperasi memiliki perangkat inti kelembagaan.
- c. Sistem pengelolaan yang sehat berdasarkan *Good Cooperative Governance*, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dalam arti akuntabel dan transparan.
- d. Prasarana dan sarana usaha koperasi yang memadai. Dalam rangka pembangunan kapasitas usaha, koperasi perlu memiliki prasarana dan sarana usaha, baik fisik maupun non fisik.
- e. Menciptakan sistem pemberdayaan dan perlindungan koperasi kepada anggota. Sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip pendidikan perkoperasian, maka koperasi harus mempunyai sistem pelayanan usaha yang sekaligus mempunyai fungsi pemberdayaan dan perlindungan.

Saran

Secara substansial ,unsur-unsur di atas harus dibangun secara utuh dan terpadu menjadi ekonomi rakyat yang dalam pelaksanaan operasionalnya membutuhkan lingkungan strategis yang kondusif. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasisi koperasi tersebut memerlukan sumber daya ekonomi yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh koperasi. Hal ini mengingat koperasi indonesia mempunyai misi untuk memberdayakan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Untuk mempercepat pemberdayaan peran pemerintah sangat penting dan menentukan, dalam melaksanakan pembinaan koperasi pemerintah memadukan pendekatan top down dan botton up, untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarkat dan kemandirian koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- David Smith, Phill Event, 1983, *Das Kapital* , edisi Indonesia, Teplok Press
- Eriyanto, 1996, *Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen*, IPB-Press, Bogor.
- Eriyatno, 1966, *Sistem Ekonomi Kerakyatan, Suatu Telaah dari Ilmu Sistem*. Majalah Perencanaan Pembangunan No. 4, 33-39.
- Friedman Thomas, L, 2005 *The World is Flat*.
- Panji Anaroga, 2002, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Reineka Cipta
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Tjakrawardaja, S. 1998. *Koperasi Sebagai Sokoguru Ekonomi*, Makalah.
- Thobi Mutis, 2004, *Pengembangan Koperasi*, PT Grasindo, edisi 4, Jakarta
- Thobi Mutis, 2002, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi*, UP Usakti, Jakarta
- Undang- Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian